

TESIS

ANALISIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Studi Kasus pada Kantor Bappedasu

DISUSUN

O

L

E

H



**DALIL MAHA
NPM. 051801014**

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2007

**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA MAGISTER ADMINISTRASI
PUBLIK UNIVERSITAS MEDAN AREA (UMA)**

LEMBARAN PERSETUJUAN

**JUDUL : ANALISIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUNAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Studi Pada Bappeda Propinsi Sumatera Utara**

N a m a : DALIL MAHA

N I M : 051801014

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DRS. MURBANTO SINAGA, MA

DRS. KARIONO, MA

**Ketua Program Studi ,
Magister Administrasi Publik**

Direktur,

Drs. Kariono, MA

Drs. Heri Kusmanto, MA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Pascasarjana Universitas Medan Area. Adapun judul Tesis ini adalah ***“ANALISIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA”***.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, para pembaca untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yth :

1. Bapak Prof.DR.A. A'yub, MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Magister Admiistrasi Publik
3. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, Wakil Direktur PPs UMA
4. Bapak Drs. Murbanto Sinaga, MA, Pembantu Direktur II PPs UMA, sekaligus sebagai pembimbing I

5. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, dan juga sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis
6. Bapak Drs. RE. Nainggolan, MM, Kepala Bappeda dan Ir. Riadil Akhir Lubis, MSi, Wakil Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Utara, termasuk para Kepala Bidang, dan Sdr/i Kasubbid dan seluruh staf pegawai Bappeda Propinsi Sumatera Utara atas bantuan maupun dukungan moril dan materil yang selama ini, sehingga penulis, baik semenjak mengikuti perkuliahan maupun dalam menyelesaikan penelitian di Bappeda Propinsi Sumatera Utara
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu dan bimbingan untuk kelancaran perkuliahan maupun dalam proses pelayanan penyusunan dan penyelesaian Tesis ini
8. Rekan-rekan se-Almamater, yang telah membantu, memberikan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis

Selain itu secara khusus terimakasih pula kepada istri, anak-anakku dan keluarga telah memberikan semangat dan dorongan yang dibarengi dengan mengalirkan do'a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga amal sholeh dan bantuan moril dan material mereka semua kiranya mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wataala, Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari yang sempurna, baik dari segi pembahasan maupun materi yang disajikan, untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran masukan yang sifatnya membangun bagi penyempurnaan Tesis ini dan menjadikan bahan dalam penulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis menyerahkan diri dengan kerendahan hati, kepada Tuhan Y.M.E. atas segala kekurangan dalam penulisan dari pada Tesis ini, dan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait bila membutuhkannya, semoga penulis dapat lebih berkarya sebagai bakti kepada orangtua, keluarga dan bangsa dan juga secara khusus kepada anak saya sebagai pendorong atau motivasi, agar lebih bergiat dalam menggeluti berbagai disiplin ilmu dan berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dalam arti luas.

Medan, Juni 2007

Wassalam
Penulis


Dalil Maha



ABSTRAK

Dalil Maha, 2007, ANALISIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Studi Bappeda Propinsi Sumatera Utara)

Dibawah Bimbingan Drs. Murbanto Sinaga, MA dan Drs. Kariono, MA

Terdiri dari: 86 halaman, 6 Bab, 6 Lampiran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu perangkat daerah yang khusus menangani Perencanaan Pembangunan pada daerah Propinsi Sumatera Utara, mempunyai peranan strategis dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan di Daerah Propinsi Sumatera Utara. Tugas utama Bappeda Propinsi Sumatera Utara adalah Membantu Gubernur Sumatera Utara dalam menentukan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah, memonitor pelaksanaan penyusunan perencanaan program/proyek dan melakukan penilaian/evaluasi atas pelaksanaannya serta melakukan peninjauan kerjasama antar Provinsi, Kabupaten/Kota maupun kerjasama dengan Provinsi yang berada di negara lain .

Dalam rangka mencapai keberhasilan Perencanaan Pembangunan Tahunan tersebut, maka sangat dituntut kinerja yang optimal dari setiap aparat Bappeda Propinsi Sumatera Utara maupun untuk mensinkronkan dan mensinergikan rencana program dan usulan dari setiap unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selain itu, memperhatikan, penganalisisan dan meminimalisasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi, faktor kepemimpinan dan budaya , etos kerja , kebijakan-kebijakan dan keputusan yang ditentukan yang disesuaikan dengan iklim situasi, kondisi dan politik yang dinamis dan realitas yang berkembang dengan perubahan yang dihadapi dalam kehidupan hubungannya dengan kebutuhan masyarakat, serta mengakselerasikan jenis peraturan dan ketentuan yang menjadi acuan dan pedoman. Dengan demikian senantiasa dapat menyesuaikan pada perubahan yang belum sempat semua pihak dapat memahaminya untuk diberlakukan, disebabkan peraturan tersebut, kurang tersosialisasikan, keterbatasan sumber-sumber pembiayaan, serta dukungan dan peranan dari semua stakeholders, kemampuan kualitas sumber daya manusia untuk memterjemahkan dan menjabarkan baik mekanisme, alur perencanaan dan penganggaran jadwal pembahasan dalam penyusunan dari setiap perencanaan pembangunan tahun tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sejauhmanakah hal-hal tersebut di atas, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi dapat memberikan kendala dan hambatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan dengan penerapan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kedudukan hukum sesuai dengan hirarkhinya dan juga ingin mengetahui faktor-faktor yang lain dapat memberi pengaruh atas penyusunan dalam sistem perencanaan dan penganggaran dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), RKPD, Renstra, Renja dan RKA SKPD dengan dihubungkan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang berhubungan dengan anggaran, berkaitan dengan hubungan hal tersebut, bagaimanakah para Aparat Perencana di propinsi dan Kabupaten/Kota juga peran serta Stakeholders. untuk merumuskan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan dimaksud. Oleh karena itu, sampel diambil secara *total sampling*, sebanyak 65 orang. Yang terdiri dari unsur Bappeda Propinsi dan kabupaten/kota, Perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unsur Muspida/DPRDSU, Tokoh masyarakat, Agama, Pemuda, Adat, dan Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode korelasional dengan menggunakan korelasi melalui wawancara dengan Diskripsi yaitu; untuk mengetahui sejauh manakah mereka mengetahui, mendukung dan berperan dalam penyusunan perencanaan tahunan provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum sepenuhnya menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyesuaikan kedudukan hirarki hukum yang berlaku di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota, oleh karena itu menurut hasil pembahasan dan analisis penelitian diperlukan kaji ulang atas beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan rencana pembangunan tahunan dan juga masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi termasuk mekanisme, alur dan jadwal yang telah ditetapkan mengalami keterlambatan baik yang menyangkut penyusunan perencanaan maupun penganggaran. maupun didalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Oleh karena itu perlu upaya untuk mensinkronkan, integrasi serta sinergitas dalam semua komponen yang terlibat didalamnya sehingga rencana pembangunan tahunan tersebut dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran.....	6
1.6. Hipotesis.....	11
1.7. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perencanaan.....	13
2.2. Perencanaan Anggaran.....	14
2.3. Kebijakan Perencanaan Daerah.....	17
2.3.1 Perencanaan Pembangunan Tahunan Menurut UU No. 17 Tahun 2003	18
2.3.2 Perencanaan Pembangunan Tahunan Menurut UU No. 25 Tahun 2004	19

2.3.3 Perencanaan Pembangunan Tahunan Menurut UU No. 32 Tahun 2004	27
2.4. Eektivitas Komunikasi Organisasi	29
2.5. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	33
2.5.1 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	33
2.5.2 Pendapatan Daerah.....	35
2.5.3 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	36
2.5.4 Kebijakan Umum APBD.....	38
2.5.5 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.....	38
2.5.6 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.....	39
2.5.7 Mekanisme Penyusunan Ranperda APBD.....	40
2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006.....	42
2.6.1 Belanja Tidak Langsung.....	43
2.6.2 Belanja Langsung	44
2.6.3 Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah...	44
2.6.4 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.....	44
2.7. Forum Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang).....	45

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian	51
3.2. Populasi dan Sampel.....	51
3.3. Rencana Sampling	51
3.4. Teknik Pengumpulan data dan Pengukurannya	52
3.5 Operasionalisasi Variabel	53
3.6. Teknik Analisis Data	55

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- 4.1. Diskripsi Bappeda Propinsi Sumatera Utara 57
- 4.2. Tugas dan Fungsi Bappeda Propinsi Sumatera Utara.. 58
- 4.3. Visi, Misi dan Tujuan Bappeda Prop.Sumatera Utara.. 71

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

- 5.1. Hasil Penelitian 74
- 5.2. Analisis Data 79

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

- 6.1. Kesimpulan 82
- 6.2. Saran - Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA 85

DAFTAR LAMPIRAN

ANALISIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pemerintah meletakkan komitmen politik untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia Indonesia mulai dari penataan sistem perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta profesional masyarakat dan pemerintah daerah sejak dalam tahap perencanaan sampai pemanfaatan, pelestarian dan manajemen feedback. Manakala Undang - Undang itu dilaksanakan secara konsisten, maka apa yang dibangun senantiasa didasarkan pada kebutuhan nyata manusia Indonesia yang multiposisi baik sebagai makhluk, individu, orang dan penduduk maupun sebagai masyarakat, rakyat, warga bangsa dan warga dunia atau pun komunitas global.

Melalui Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bangsa Indonesia secara tegas menghendaki agar di tengah euphoria reformasi sistem pemerintahan sentralistik menuju desentralistik, pemerintah daerah dan masyarakat serta seluruh elemen stakeholder pemerintahan daerah harus mengarahkan berbagai kebijakan dalam kerangka implementasi kebijakan otonomi daerah pada percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, keberdayaan masyarakat dan optimalisasi peranserta masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan manusia Indonesia yang lebih berkualitas melalui kebijakan

otonomi daerah dimulai dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga dapat berperan aktif menjadi subyek otonomi daerah itu sendiri menuju suatu daerah otonom yang berdaya, mandiri dan sejahtera.

Pencapaian tujuan otonomi daerah yang demikian diarahkan melalui penerapan prinsip, asas, tujuan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah otonom yang konsisten dan yang didasarkan pada potensi sumber daya dan perkembangan masyarakat desa dan kelurahan masing - masing. Untuk itu, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah otonom indikasi jangka panjang dan menengah pada intinya mengatur visi, misi, arah pembangunan, program kerja kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Dokumen rencana pembangunan daerah ada dua yakni RKPD dan Renstra - SKPD. RKPD memuat rancangan kerangka otonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah otonom. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah otonom erat terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan

DAFTAR PUSTAKA

- Djamaluddin, M. Arief., (Revisi) 1982 *Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran*, Penerbit Balai Aksara, Yudhistira, Pustaka Saadiyah. Jakarta.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Enthoven, Alain C., 1969, *The Systems Analysis Approach*, dalam buku Harley H. Hinrichs dan Gracme M. Taylor.
- Perda Provsu No. 1 Tahun 2007 tentang *Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Perda Provsu No 1 Tahun 2007 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* Tahun 2007.
- Peraturan Gubsu No. 9 Tahun 2007 tentang Penjabaran *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* Tahun Anggaran 2007.
- Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) *Transisi Provsu Tahun 2006-2009*.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*RKPD*) *Tahun 2007*
- Republik Indonesia, 2000. *Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi* . Internet.
- Republik Indonesia, 2003. *Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta : Fokusmedia.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Internet
- Republik Indonesia, 2004. *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : CV. Eko Jaya.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Internet.
- Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*. Internet.
- Republik Indonesia, 2007. *Surat Edaran Bersama Kementerian Negara PPN/Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor*

**0008/M.PPN/01/2007, 050/264A/SJ Tanggal 12 Januari 2007
Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tahun 2007.** Internet

Sedarmayanti, 2003. ***Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah.***
Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Syamsi, Ibnu., 1986, ***Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan,
Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat
Nasional dan Regional*** , Penerbit CV. Rajawali

Syafri, Sofyan H., 1996, ***Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap,***
Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2005, ***Manajemen Publik,*** Penerbit PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia Jakarta.

